

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN BOGOR

INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT STRATEGY IN INCREASING INVESTMENT IN BOGOR REGENCY

Muchamad Wazharil

IPB University, Bogor, Indonesia

Jalan Raya Dramaga, Babakan, Dramaga, Kabupaten Bogor, Indonesia

ahmedz.wazharov@gmail.com

ABSTRACT

The industrial sector is a contributor to GRDP and the largest investment value compared to other sectors in Bogor Regency, the development of industrial estates is very important in the framework of equitable development and increasing investment to provide land that is clear and clean and ready to invest for business actors, industrial location determination is not only based on criteria technically but also from the perspective of the desires of business actors, besides that the potential of natural resources as industrial raw materials and the potential for land belonging to the regional government also need attention. This study aims to analyze alternative locations for industrial estates by determining the leading industries that are feasible to be developed and the development of industrial estates initiated by the local government. Data collection methods, namely interviews, literature studies and observation, primary data and secondary data are the types of data used in this study. Data analysis techniques in this study used the LQ and SSA methods to analyze superior commodities, the overlay method to analyze potential land. The results showed that the manufacturing industry is a basic sector in Bogor Regency with leading industries that are feasible to develop, namely: (1) the food industry, (2) the pharmaceutical, cosmetic and medical device industries, (3) the textile, leather, footwear and miscellaneous industries and (4) transportation equipment industry. With regard to the location, the industrial area development plan is available and feasible with management in the form of UPT BLU and cooperation between the local government and the private sector.

Keywords: *leading industry, industrial location, management, cooperation.*

ABSTRAK

Sektor industri merupakan penyumbang PDRB dan nilai investasi terbesar dibandingkan sektor lainnya di Kabupaten Bogor, pengembangan kawasan industri sangat penting dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan investasi untuk menyediakan lahan yang clear and clean dan ready to invest untuk pelaku usaha, penentuan lokasi industri tidak hanya dari kriteria teknis tetapi juga dari perspektif keinginan pelaku usaha, disamping itu potensi sumber daya alam sebagai bahan baku industri dan potensi lahan milik pemerintah daerah juga perlu mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif lokasi kawasan industri dengan menentukan industri unggulan yang layak dikembangkan dan pengembangan kawasan industri prakarsa pemerintah daerah. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, studi literatur dan observasi, data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode LQ dan SSA untuk menganalisis komoditas unggulan, metode tumpang susun (overlay) untuk menganalisis lahan yang berpotensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan sektor basis di Kabupaten Bogor dengan industri unggulan yang layak dikembangkan yaitu: (1) industri pangan, (2) industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, (3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dan (4) industri alat transportasi. Berkaitan dengan lokasi rencana pengembangan kawasan industri sudah tersedia dan layak dengan pengelolaan berbentuk UPT BLU dan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta.

Kata Kunci: industri unggulan, lokasi industri, pengelolaan, kerjasama.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah mulai serius menggarap sumber penggerak ekonomi dari sektor investasi, oleh karena itu untuk mengundang para investor baik nasional maupun asing diperlukan kebijakan-kebijakan daerah yang dapat menarik minat investor. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam menarik minat investor karena telah memberikan bukti nyata terhadap multiplier effect bagi perekonomian nasional, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Peranan investasi yang sangat strategis telah mendorong pemerintah daerah untuk berusaha menarik investor berinvestasi di daerahnya. Upaya menarik investasi dilakukan melalui penciptaan berbagai insentif dan kemudahan, salah satunya dengan menyediakan kawasan industri. Dimana dengan adanya kawasan industri dapat memberikan berbagai kemudahan sehingga akan mampu menarik banyak investor untuk mendirikan berbagai pabrik atau segala hal yang terkait dengan usaha yang dijalankannya.

Pengaturan mengenai Kawasan Industri telah diakomodir dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, berdasarkan pasal 3 salah satu tujuan perindustrian adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang salah satu strateginya adalah mengembangkan kawasan industri demi untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah. Dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan industri, pemerintah telah menerbitkan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, di mana setiap perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi dalam kawasan industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Kawasan industri mempunyai banyak keunggulan dan kelebihan. Menurut Mulyadi (Winardi 2017) kawasan industri memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, dan menyediakan lapangan kerja yang luas. Kawasan industri dengan infrastruktur yang lengkap dan memadai dapat menjadi suatu keuntungan bagi industri yang berada di dalamnya karena dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan industri, Selain itu, jarak yang berdekatan antara industri yang saling berkaitan akan mempermudah proses distribusi barang sehingga menciptakan efisiensi produksi. Dengan keuntungan tersebut, diharapkan perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri dapat meningkatkan produktivitas sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi industri.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan Kabupaten Bogor yang dapat diandalkan peranannya dalam membantu mencapai tujuan prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023 (RPJMD) yaitu penanggulangan kemiskinan, pengangguran serta peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah dan memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 52,99% disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,10% serta sektor konstruksi sebesar 10,21%, tingginya sumbangan PDRB pada sektor industri tersebut terlihat bahwa adanya industri di Kabupaten Bogor memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -2,47% karena dampak pandemi covid-19, yang kemudian naik di tahun 2021 sebesar 2,51% dan tahun 2022 naik sebesar 5,46% (BPS Kab. Bogor, 2023).

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kedalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (prime over) ekonomi industri dan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan kawasan industri, sehingga diharapkan mampu menciptakan industri-industri yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian baik di level regional maupun nasional. Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, kawasan industri Kabupaten Bogor saat ini antara lain: Kawasan Industri Sentul Industrial Estate (KI Sentul) yang berada di Kecamatan Citeureup dan Babakan Madang, Kawasan Industri Cibinong Center Industrial Estate (KI CCIE) yang berada di Kecamatan Klapanunggal dan Citeureup, serta aglomerasi industri di Kecamatan Klapanunggal, Gunung Putri dan Cileungsi, walaupun secara eksisting dan manajemen pengelolaan hanya dua kawasan saja yang masih eksis hingga sekarang yaitu KI Sentul dan KI CCIE. Sementara itu, wilayah lain dengan peruntukan ruang kawasan peruntukan industri (KPI) dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan industri belum dimanfaatkan secara optimal dan sebaliknya masih terdapat perusahaan industri yang dibangun bukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri.

Relatif kecilnya luas kawasan industri di Kabupaten Bogor, yaitu sekitar 222 Ha, dibandingkan Kabupaten Bekasi yang memiliki luas 9842 Ha, Kabupaten Karawang 7145 Ha, dan Kabupaten Purwakarta dengan luas kawasan industri 1260 Ha (Keminves/BKPM 2023), merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya investasi sektor industri di Kabupaten Bogor. Padahal investor swasta di Kabupaten Bogor selama ini didominasi pada sektor perindustrian.

Kawasan industri dapat mempermudah investor mencari lahan industri yang clear and clean serta ready to invest. Dengan adanya pengembangan kawasan industri diharapkan investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Bogor, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian. Kawasan Industri di Kabupaten Bogor saat ini hanya memiliki 2 (dua) kawasan industri (Kemenperin dan BKPM), yaitu KI Sentul dengan luas lahan 120 Ha, dan KI CCIE dengan luas lahan 102 Ha yang keseluruhan pengelolaan dan penguasaannya oleh swasta, dari kedua kawasan tersebut hampir dipenuhi perusahaan industri.

Keberadaan lokasi KI tersebut berada di wilayah tengah dan timur Kabupaten Bogor yang sudah padat dan jenuh untuk kegiatan industri. Berkaitan dengan hal diatas, untuk menunjang kelancaran kegiatan industri dan untuk pemerataan pembangunan industri, diperlukan alternatif lokasi di wilayah lain yang potensial dibangun kawasan industri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.

Tabel 1. Realisasi Investasi dan Jumlah Proyek Kabupaten Bogor tahun 2022

Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	Jumlah Proyek
Hotel dan Restoran	703,180,766,162	358
Industri Pengolahan	5,150,158,715,251	1538
Jasa Lainnya	1,795,686,552,261	184
Kehutanan	5,100,000	11
Konstruksi	475,124,700,000	271
Listrik, Gas dan Air	17,160,564,996	22
Perdagangan dan Reparasi	570,979,257,834	1112
Perikanan	2,500,000,000	12
Pertambangan	119,613,300,000	61
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4,796,629,711,716	214
Peternakan	89,241,007,042	70
Tanaman Pangan & Perkebunan	16,451,300,000	20
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1,602,940,950,288	64
Jumlah	15,339,671,925,550	3,937

Sumber: DPMPTSP Kab. Bogor (2023), data diolah

Pengembangan sektor industri harus dikaitkan dengan potensi sumberdaya lokal karena akan memberikan dampak langsung pada wilayah yang bersangkutan. Dengan penggunaan sumberdaya dan potensi wilayah diharapkan akan terbentuk keunggulan komparatif pada masing-masing industri yang mendorong terjadinya perdagangan antar wilayah yang paling menguntungkan dan tercapainya tujuan pembangunan wilayah yang berupa peningkatan pendapatan dan penekanan tingkat pengangguran (Jamal dan Fakhruddin, 2021). Adanya sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan dapat berperan penting sebagai push factor bagi suatu perekonomian agar menjadi penggerak utama atau prime mover bagi sektor-sektor ekonomi tersebut dalam rangka pembangunan wilayah (Baransano et al. 2016). Lebih lanjut lagi, suatu sektor dikatakan menjadi unggulan (leading sector) jika merupakan sektor basis, yakni sektor yang mempunyai peranan yang lebih besar pada wilayah tersebut dibandingkan pada wilayah tingkatan atasnya (Tarigan, 2008). Wilayah Kabupaten Bogor sebagai daerah yang dekat dengan ibukota dan memiliki kekayaan sumberdaya yang potensial memiliki potensi besar dalam menarik investor swasta untuk turut berinvestasi.

Pembangunan KI menjadi salah satu instrumen untuk percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga intervensi pemerintah daerah sangat diperlukan. Wujud intervensi tersebut dalam bentuk investasi langsung dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah melalui pembangunan kawasan industri oleh Pemda maupun melalui kerjasama dengan swasta. Intervensi pemerintah daerah dalam membangun kawasan industri memiliki urgensi yang penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi

rendahnya minat investasi swasta, mengoptimalkan potensi daerah dan mengatasi dominasi swasta dalam kepemilikan lahan kawasan industri yang dapat mengakibatkan tingginya harga lahan di kawasan industri (Winardi, 2021).

2. METODE PENELITIAN

a) Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor yang secara geografis terletak pada $-6^{\circ} 18'$ Lintang Utara dan $-6^{\circ} 47'$ Lintang Selatan dan antara $106^{\circ} 01'$ - $107^{\circ} 103'$ Bujur Timur, dengan daerah penelitian dibatasi di Kecamatan Jasinga. Gambar 4 menunjukkan lokasi Kecamatan Jasinga (warna hijau muda) yang terletak di bagian barat Kabupaten Bogor dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten), Kecamatan Jasinga memiliki 16 desa dengan luas daerah 115,01 KM2.



b) Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan berupa seperangkat komputer yang dilengkapi dengan Software Microsoft Office dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Bahan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, sedangkan data sekunder bersumber dari BPS Kabupaten Bogor, BPS Provinsi Jawa Barat, BAPPEDALITBANG, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Data tersebut meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, data realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bogor, dan peta RTRW Kabupaten Bogor dan data sekunder lainnya

c) Analisis Data

Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) digunakan untuk mengetahui basis ekonomi atau komoditas unggulan di suatu wilayah. Analisis LQ pada dasarnya merupakan analisis untuk mengetahui posisi apakah suatu wilayah berposisi sebagai net importer atau sebagai net exporter pada suatu produk atau sektor tertentu, dengan membandingkan antara produksi dan konsumsinya. Salah satu aspek dari analisis LQ adalah sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan. Nilai koefisien LQ >1 artinya subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dan sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Nilai koefisien LQ (mendekati 1) menunjukkan subsektor tersebut bukan subsektor andalan dan belum dapat diekspor ke luar daerah sehingga hanya dikonsumsi di wilayah tersebut saja atau belum berkembang. Untuk itu perlu pengelolaan lebih lanjut agar subsektor ini bisa berkembang, komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki nilai LQ >1 dan komponen SSA differential shift (DS) positif. Setelah dilakukan analisis LQ dan SSA kemudian menganalisis penentuan industri unggulan berdasarkan pendekatan industri prioritas nasional (RIPIN tahun 2015-2035) serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Provinsi Jawa Barat (RPIP Jawa Barat 2018-2038).

Analisis penentuan lokasi yang berpotensi diawali dengan analisis ketersediaan lahan kemudian dilanjutkan dengan analisis kesesuaian lahan untuk mengetahui lokasi lahan yang tersedia untuk pengembangan lokasi kawasan industri berdasarkan peta administrasi wilayah skala 1:50.000, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) skala 1:50.000 tahun 2016-2036. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tumpang susun (overlay) berdasarkan 3 aspek yaitu penggunaan lahan eksisting, alokasi ruang atau pola ruang dan ketentuan teknis kawasan industri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penentuan Lokasi Kawasan Industri

Pemilihan lokasi yang tepat bagi pembangunan kawasan industri akan berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri pada masa akan datang. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan tidak hanya mempetimbangkan aspek teknis tetapi juga melihat dari perspektif pelaku usaha dalam rangka mengakomodasi keinginan investor yang menekankan prinsip efisiensi dan profit oriented. Kriteria dasar penilaian lokasi kawasan industri mengacu kepada Permenperin No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

Kriteria	Faktor Pertimbangan	Aspek Teknis	Perspektif Pelaku Usaha
Jarak ke pusat kota	kedekatan dengan fasilitas publik, kantor pemerintahan dan fasilitas perbankan		✓
Jarak terhadap pemukiman	kemudahan tenaga kerja, dampak lalu lintas,	✓	✓

Kriteria	Faktor Pertimbangan	Aspek Teknis	Perspektif Pelaku Usaha
Jaringan jalan atau rel kereta api	dampak polutan dan limbah		✓
Jaringan energi, listrik dan telekomunikasi	kemudahan jalur distribusi dan transportasi		✓
Jarak terhadap sungai atau sumber air baku	ketersediaan jaringan energi, listrik dan telekomunikasi	✓	✓
Topografi/kemiringan tanah	ketersediaan sumber air baku, pengelolaan dan pembuangan limbah	✓	
Daya dukung lahan	relatif datar maks. 15%	✓	
Kesuburan tanah	komposisi dan tingkat kelabilan tanah	✓	
Peruntukan lahan	relatif tidak subur (non irigasi teknis)	✓	
Ketersediaan lahan	non pertanian, non permukiman, non konservasi	✓	
	min. 50 Ha untuk kawasan industri	✓	✓
	min. 5 Ha untuk sentra industri kecil dan menengah		
Harga lahan	relatif tidak mahal		✓

Sumber: Data Diolah, 2023

Nilai Dalam rangka pemerataan persebaran pembangunan industri daerah dan meningkatkan investasi, berdasarkan Perda No. 11 Tanun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengalokasikan kawasan peruntukan industri (KPI) yang bisa dikembangkan untuk dibangun kawasan industri (KI) di Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Karakteristik potensi lokasi kawasan industri di Kecamatan Jasinga sebagai berikut:

- Jarak ke ibukota kecamatan 8 km (kurang dari 10 km)
- Jarak terhadap permukiman terdekat kurang dari 1 km, bahkan terdapat permukiman yang menempel dengan lokasi kawasan industri. Hal ini akan berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, dampak negatifnya akan ada polutan dan limbah yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sehingga, untuk mencegah adanya dampak negatif dari kegiatan industri terhadap permukiman di sekitarnya, perlu dibangun industri yang ramah lingkungan.
- Berada di koridor jalan lokal primer (jalan kabupaten) yang terhubung dengan jalan nasional (ruas Cigelung/Banten-Jasinga/Jawa Barat), sehingga sangat ideal untuk dijadikan sebagai kawasan industri.
- Jaringan listrik sudah menjangkau rencana lokasi kawasan industri
- Terdapat jaringan telepon nirkabel (1 menara BTS dan 4 operator seluler).
- Memiliki morfologi lahan relatif datar dan sebagian berupa lereng.
- Rencana lokasi dibatasi sungai besar dan dilalui oleh sungai kecil.
- Penggunaan lahan eksisting berupa kebun, semak/belukar dan peternakan.
- Harga lahan relatif masih murah
- Sudah ada embrio industri dalam lokasi tersebut yaitu industri peternakan

b) Penentuan Industri Pengolahan

Pembahasan mengenai basis industri pengolahan dilakukan dengan menghitung nilai location quotien (LQ) dengan menggunakan indikator pendapatan wilayah (PDRB). Sebelum dilakukan analisis LQ untuk masing masing subsektor industri dengan menggunakan indikator komoditas unggulan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan nilai LQ untuk masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Bogor dengan wilayah Propinsi Jawa Barat sebagai wilayah pembanding. Penjabaran secara luas sektor-sektor perekonomian dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan sektor unggulan yang diprioritaskan dan dikembangkan dalam pembangunan daerah selanjutnya.

Berdasarkan perhitungan nilai LQ di seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bogor, terdapat empat sektor ekonomi yang menjadi sektor basis berdasarkan indikator pendapatan (PDRB), yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang dan sektor konstruksi. Hal ini menunjukkan sektor tersebut telah mampu memenuhi permintaan wilayah dan akan mendorong pertumbuhan wilayah tersebut.

c) Potensi Komoditas Unggulan

Hasil Sumberdaya alam yang berpotensi menjadi bahan baku dan/atau pendukung pembangunan industri berdasarkan analisis LQ dan laporan akhir rencana pembangunan industri kabupaten/RPIK (Disperdagin Kab. Bogor, 2022) adalah sebagai berikut:

- Sektor tanaman pangan, komoditas yang menjadi unggulan adalah padi dan beras
- Sektor tanaman sayuran, komoditas yang menjadi unggulan yaitu bayam, kacang panjang dan kangkung
- Sektor tanaman buah buahan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu alpukat, belimbing, durian, jambu air, jambu biji, salak, sawo dan sirsak
- Sektor tanaman obat obatan (biofarmaka), komoditas yang menjadi unggulan yaitu kencur dan sambiloto.
- Sektor tanaman perkebunan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu kopi dan kelapa sawit.
- Sektor peternakan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu sapi dan ayam petelur.
- Sektor perikanan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu ikan lele.

d) Potensi Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor, jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebanyak 5.489.536 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.820.924 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.668.612 jiwa, untuk angkatan kerja penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun 2022, di ketahui terdapat 245.133 jiwa yang bekerja pada sektor industri, yang tersebar pada 5.756 perusahaan di Kabupaten Bogor.

Piramida penduduk Kabupaten Bogor tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor termasuk struktur penduduk muda yang diperlihatkan oleh panjang piramida kelompok umur 10-14 tahun ke bawah lebih panjang dari kelompok umur lainnya, atau bentuk piramidanya cenderung mengerucut di bagian atas. Dengan demikian, terdapat kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif, kondisi tersebut dikenal dengan bonus demografi. Bonus demografi tersebut seyogyanya dijadikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang bernilai tambah tinggi bagi kemajuan perekonomian daerah, salah satunya melalui pembangunan di bidang perindustrian.

e) Penentuan Industri Prioritas

Penentuan industri unggulan Kabupaten Bogor berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional (RIPIN tahun 2015-2035), serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Provinsi Jawa Barat (RPIP Jawa Barat 2018-2038 yaitu (1) industri pangan; (2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; (3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; (4) industri alat transportasi; (5) industri elektronika dan telematika/ICT; (6) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; serta (7) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam. Berdasarkan hal tersebut, maka potensi sumberdaya alam Kabupaten Bogor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan industri unggulan terdapat pada 4 industri prioritas yang layak dikembangkan, yaitu :

1. Industri Pangan

- Industri pengolahan susu untuk kesehatan dan industri probiotik berbasis susu
- Industri aneka pangan olahan berbasis kopi organik dan industri suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi
- Industri pengolahan buah buahan dan sayuran dalam kaleng dan industri suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah pengolahan buah

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

- Industri produk vitamin C dan industri produk herbal

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

- Industri produk kulit khusus (advanced material) yang berbahan baku kulit sapi

4. Industri Alat Transportasi

- Industri biofuel dan penggerak mula BBM yang berbahan baku kelapa sawit

Adapun ke 3 industri unggulan lainnya yang tidak dapat disediakan oleh Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan sumber daya manusia, lokasi KPI, kesiapan infrastruktur dan jaringan rantai pasok.

f) Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah

Beberapa alternatif model dan bentuk kelembagaan pengembangan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah, yaitu berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Biasa, UPT dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU), dan BUMN/BUMD, Winardi (2021)

mengatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Salah satu instansi di bawah pemerintah yang dalam ini adalah Kementerian Perindustrian di pusat dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah merupakan satuan kerja yang secara khusus melakukan pengembangan kawasan industri. Satuan kerja tersebut harus diberikan keleluasan dalam penggunaan anggaran penerimaan negara yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk keperluan pengembangan kawasan industri. Satuan kerja yang dimaksud adalah BLU yang memiliki tingkat fleksibilitas untuk melakukan pengelolaan keuangan hasil penerimaannya. Pada umumnya suatu satuan kerja UPT memerlukan waktu yang relatif lama untuk menjadi sebuah BLU. Hal ini diharapkan tidak terjadi pada satker pengembangan kawasan industri. Selama syarat utama telah dipenuhi, maka satuan kerja pengembangan kawasan industri diharapkan dapat langsung mengajukan dan mendapat status BLU.

Sementara itu, dukungan regulasi pada dasarnya sudah cukup kuat, dimana telah diatur dalam regulasi kawasan industri, kelembagaan pengelolaan kawasan industri diarahkan akan menjadi sebuah BLU. Artinya, UPT yang nantinya terbentuk akan dikembangkan statusnya menjadi BLU. BLU yang dimaksud merupakan instansi di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah yang didirikan dalam rangka melakukan pelayanan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri berupa penyediaan barang dan jasa layanan yang dijual atau disewa tanpa memprioritaskan profit serta aktivitasnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas. Hasil penelitian Winardi (2021) mengungkapkan pemilihan model UPT PK-BLU sebagai model kelembagaan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah sudah tepat. Oleh karena itu, apabila lembaga tersebut sudah terbentuk maka diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan industri secara merata di seluruh wilayah.

g) Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Acapkali daerah memiliki aset yang sangat potensial untuk dimanfaatkan atau dikembangkan, namun terhalang oleh terbatasnya sumber dana atau keterbatasan kemampuan SDM dalam menggunausahakan aset tersebut. Di sisi lain swasta atau masyarakat merupakan pihak yang mempunyai potensi pendanaan dan teknologi yang perlu diproduktifkan, dengan demikian melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan kedua belah pihak.

Pembangunan kawasan industri membutuhkan investasi padat modal dan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk pembangunan kawasan industri prakarsa pemerintah, maka salah satu skema yang ditawarkan adalah pembangunan kawasan industri melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau Public Private Partnership (PPP). Hasil penelitian Winardi (2021) mengungkapkan bahwa implementasi pembangunan kawasan industri melalui skema PPP tersebut dibutuhkan kelembagaan kawasan industri berupa UPT PK-BLU yang mempunyai peran penting dalam penerapan skema PPP antara lain:

- Berkerjasama dengan calon investor perusahaan industri di dalam kawasan industri.
- Melakukan penagihan tarif layanan kepada tenant di dalam kawasan industri.
- Mengelola dana dari hasil layanan kepada tenant untuk operasional kawasan industri.
- Memberikan pengembalian investasi kepada swasta yang dapat berupa availability payment.

4. PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam memajukan perekonomian daerah dengan menggarap sumber penggerak ekonomi dari sektor investasi. Sektor industri merupakan sektor yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena mampu memberi dampak penciptaan nilai tambah yang lebih besar, mengurangi tingkat pengangguran dengan tersedianya lapangan kerja, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Penentuan lokasi industri menjadi penting karena tidak hanya menilai lokasi berdasarkan kriteria teknis, tetapi juga harus mengakomodasi keinginan pelaku usaha, pengembangan kawasan industri juga harus dikaitkan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sekitar, karena selain lebih efisien juga akan memberikan keunggulan komparatif pada masing-masing industri yang akan mendorong terjadinya perdagangan antar wilayah yang paling menguntungkan.

Pembangunan kawasan industri merupakan strategi mewujudkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan industri baru dan dijadikan instrumen untuk percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga diperlukan intervensi pemerintah daerah baik dalam bentuk investasi langsung maupun kejasama dengan pihak swasta, tujuan utama pemerintah terlibat adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, munculnya perusahaan-perusahaan baru, menyediakan lahan dengan harga yang terjangkau, dan memberdayakan kembali lahan (aset daerah) yang sudah tidak digunakan.

Penentuan lokasi alternatif kawasan industri dalam penelitian ini hanya melihat kawasan peruntukan industri (KPI) secara pola ruang, dalam konteks KI prakarsa pemerintah daerah hendaknya dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi aset/lahan milik pemda yang dapat dikembangkan untuk dibangun KI. Perlu adanya roadmap dan evaluasi kebijakan industri nasional dan provinsi dalam menentukan industri prioritas, sehingga tidak terlalu banyak subsektor industri yang menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan terkait jenis kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dan perbandingan model kelembagaan pengelola KI yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L. 2019. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Ed ke-3. Yogyakarta: BPFE.
- Baransano MA, Putri EIK, Achsani NA, Kolopaking L. 2016. Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. *J Perenc Wil dan Kota*. 27(2):119. doi:10.5614/jrcp.2016.27.2.4.

- [BPS] Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. 2022. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. Bandung: BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor. 2022. Kecamatan Jasinga Dalam Angka. Bogor: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor. 2023. Kabupaten Bogor Dalam Angka. Bogor: BPS.
- [BKPM] Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Informasi Lokasi Usaha: Kawasan Industri*. [Internet]. [diakses 2023 Mei 23]. Tersedia dari <https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha?tab=ki&page=4>.
- [DPMPTSP] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. 2022. Laporan Realisasi Investasi, Jumlah Proyek dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Bogor: DPMPTSP.
- [DISPERDAGIN] Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. 2022. Laporan Akhir Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Nasmik Raperda Industri Kabupaten Bogor Tahun 2023-2043. Bogor: Disperdagin.
- Fakhrudin dan Jamal A. 2021. Analisis sektor industri pengolahan ditinjau dari penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. 13(1):46-66.
- Hendriany R. 2023. Keterkaitan antar sektor untuk peningkatan perkembangan wilayah Kabupaten Pangandaran [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [Kemenperin] Kementrian Perindustrian. 2016. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Jakarta: Kemenperin.
- Madhavi P, Choudhury B, Catterjee A. 2022. Evidence of input sharing and labour pooling in a automobile cluster of Central India. *Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. [diakses 2023 Mei 22]; 5(4):391-399. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i4.958>.
- Marchionni C dan Oinas P. 2023. The multiple-theories problem: the case of spatial industrial clustering. *Journal of Economy and Space*. [diakses 2023 Mei 22]; 55(1):46-62. <http://doi.org/10.1177/0308518X221122791>.
- [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. 2016.
- [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. 2018.
- Porter ME, 1998. Cluster and the new economics competition. Massachusetts: Harvard Business Review.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Raharjo H. 2023. Analisis Peran Industri Agro terhadap Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahman SMT dan Kabir A. 2019. Factor influencing location choice and cluster pattern of manufacturing small and medium enterprises in cities: evidence from Khulna City of Bangladesh. *Journal of Global Entrepreneurship Research*. [diakses 2023 Mei 22]; 9(61):1-26. <https://doi.org/10.1186/s40497-019-0187-x>.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarigan R. 2005. Ekonomi regional: teori dan aplikasi, Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan R. 2012. Perencanaan pembangunan wilayah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyani N. 2019. Strategi Pengembangan Promosi dalam Meningkatkan Investasi Swasta di Kabupaten Bogor [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Winardi. 2017. Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Rumah Tangga di Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Winardi. 2021. Inovasi model kelembagaan kawasan industri prakarsa pemerintah. *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*. 3(3):267-277.